
**RELEVANSI FILSAFAT KEBUDAYAAN DALAM MENYUSUN
KEBIJAKAN MANAJEMEN PENDIDIKAN YANG HUMANIS**

Arni Muliati¹, Fela Hadziqoh², Darwin Efendi³

Universitas PGRI Palembang^{1,2,3}

arniskd17@gmail.com¹, felahadziqoh07@gmail.com², darwinpasca2010@gmail.com³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relevansi filsafat kebudayaan dalam penyusunan kebijakan manajemen pendidikan yang humanis. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana peningkatan kompetensi intelektual, tetapi juga sebagai proses pemanusiaan yang menanamkan nilai-nilai sosial dan budaya. Studi pustaka ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menelaah berbagai literatur yang membahas hubungan antara filsafat kebudayaan dan manajemen pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan yang mengabaikan aspek budaya berisiko kehilangan substansi kemanusiaannya dan berpotensi menimbulkan alienasi peserta didik. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus berakar pada nilai-nilai kultural dan kemanusiaan, serta memberikan ruang bagi guru sebagai agen perubahan budaya di lingkungan sekolah. Implikasi praktisnya adalah perlunya pelatihan bagi pemangku kepentingan pendidikan dalam memahami filsafat kebudayaan dan pengembangan indikator kinerja yang lebih holistik. Dengan demikian, pendekatan humanis berbasis filsafat kebudayaan dapat memperkuat efektivitas dan relevansi kebijakan pendidikan di Indonesia.

Kata Kunci: Filsafat Kebudayaan, Manajemen Pendidikan, Kebijakan Pendidikan, Pendidikan Humanis, Nilai Budaya, Pendidikan Inklusif.

ABSTRACT

This study aims to examine the relevance of cultural philosophy in the formulation of humanistic educational management policies. Education does not only function as a means of increasing intellectual competence, but also as a humanization process that instills social and cultural values. This literature study uses a qualitative approach by examining various literatures that discuss the relationship between cultural philosophy and educational management. The results of the study indicate that educational policies that ignore cultural aspects are at risk of losing their human substance and have the potential to alienate students. Therefore, educational policies must be rooted in cultural and humanitarian values, and provide space for teachers as agents of cultural change in the school environment. The practical implication is the need for training for educational stakeholders in understanding cultural philosophy and developing more holistic performance indicators. Thus, a humanist

approach based on cultural philosophy can strengthen the effectiveness and relevance of educational policies in Indonesia.

Keywords: *Cultural Philosophy, Educational Management, Educational Policy, Humanistic Education, Cultural Values, Inclusive Education.*

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan instrumen utama dalam membentuk karakter dan peradaban suatu bangsa. Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi, pendidikan dituntut tidak hanya untuk mencetak sumber daya manusia yang kompeten secara intelektual, tetapi juga memiliki kesadaran sosial dan kemanusiaan yang tinggi (Fadillah & Rohman, 2021). Maka dari itu, pendidikan tidak boleh dipandang sebagai proses mekanistik, melainkan sebagai proses pemanusiaan. Filsafat kebudayaan hadir sebagai pendekatan reflektif untuk memahami bagaimana manusia membentuk dan dibentuk oleh kebudayaannya. Dalam konteks pendidikan, filsafat kebudayaan memberikan landasan untuk menyusun kebijakan yang tidak sekadar pragmatis, melainkan juga berakar pada nilai-nilai kultural dan kemanusiaan (Kattouf, 2019). Pendidikan yang mengabaikan aspek budaya berisiko kehilangan substansi kemanusiaannya.

Seiring perkembangan zaman, sistem pendidikan modern sering kali dikritik karena terlalu mengedepankan pendekatan teknokratis dan birokratis. Banyak kebijakan pendidikan yang lebih fokus pada pencapaian target numerik seperti nilai ujian, akreditasi, dan peringkat lembaga, tanpa mempertimbangkan kesejahteraan psikologis dan perkembangan karakter peserta didik. Hal ini berpotensi melahirkan generasi yang cerdas secara akademik tetapi miskin secara emosional dan spiritual. Manajemen pendidikan yang humanis dibutuhkan untuk mengimbangi kecenderungan ini, dengan menempatkan manusia sebagai pusat dalam setiap kebijakan dan keputusan. Pendidikan seharusnya tidak terjebak pada pengukuran hasil semata, melainkan harus mempertimbangkan proses tumbuh kembang manusia secara menyeluruh. (Nata, 2023)

Manajemen pendidikan merupakan kegiatan sistematis yang mengatur proses pendidikan agar berjalan efektif dan efisien. Namun, dalam praktiknya, kebijakan manajemen pendidikan sering kali berorientasi pada hasil dan angka semata, tanpa mempertimbangkan aspek budaya dan psikososial peserta didik (Widiatmoko, 2020). Akibatnya, pendidikan menjadi kering dari nilai dan kurang menyentuh sisi kemanusiaan. Dalam kebijakan

pendidikan nasional, sering kali kita melihat kebijakan yang bersifat seragam dan tidak kontekstual. Hal ini mengabaikan keberagaman budaya lokal yang sesungguhnya merupakan kekayaan bangsa. Kebijakan yang tidak mempertimbangkan dimensi budaya berpotensi menimbulkan alienasi di kalangan peserta didik (Amka, 2020). Oleh karena itu, pendekatan berbasis filsafat kebudayaan menjadi semakin relevan.

Pendidikan humanis menekankan pengembangan potensi peserta didik secara utuh: intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pendidikan perlu didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang manusia dan nilai-nilai kebudayaannya (Arifin, 2022). Nilai-nilai ini tidak bisa dilepaskan dari konteks kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Ki Hadjar Dewantara sebagai pelopor pendidikan Indonesia telah menekankan pentingnya pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan budaya anak. Ia menggarisbawahi bahwa pendidikan yang sejati adalah pendidikan yang memerdekakan manusia melalui pendekatan yang menghargai kebudayaan lokal (Sutarto, 2019). Pemikiran ini menjadi dasar penting dalam membangun kebijakan pendidikan yang humanis dan kontekstual.

Filsafat kebudayaan mengkaji tentang nilai, norma, dan sistem simbol yang hidup dalam masyarakat, yang menjadi dasar dalam membentuk identitas individu dan kolektif. Dalam konteks pendidikan, filsafat kebudayaan berfungsi sebagai kerangka normatif yang memandu bagaimana proses pendidikan seharusnya diselenggarakan. Dengan memahami filosofi budaya, kebijakan pendidikan dapat lebih kontekstual dan tidak bersifat seragam (*one size fits all*). Hal ini penting, mengingat Indonesia merupakan negara yang sangat majemuk dengan beragam budaya lokal yang memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penerapan filsafat kebudayaan dalam manajemen pendidikan akan memungkinkan sistem pendidikan yang lebih adaptif dan berakar pada realitas masyarakat. (Sedyawati, 2017)

Filsafat kebudayaan juga menawarkan cara pandang yang menyeluruh terhadap keberadaan manusia dalam masyarakat. Manusia tidak hidup dalam ruang hampa, melainkan dalam jejaring nilai-nilai budaya yang memengaruhi cara berpikir dan bertindak mereka. Kebijakan pendidikan yang tidak memahami realitas ini akan gagal menyentuh kebutuhan peserta didik secara utuh (Kurniawan, 2021).

Indonesia dikenal sebagai negara multikultural yang kaya akan budaya lokal. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan sering kali bersifat sentralistik dan kurang memberikan ruang bagi ekspresi budaya lokal dalam kurikulum maupun praktik

pembelajaran. Hal ini menyebabkan peserta didik mengalami keterasingan dari identitas budaya mereka sendiri. Dengan menerapkan pendekatan filsafat kebudayaan, manajemen pendidikan dapat membuka ruang bagi pengintegrasian nilai-nilai lokal ke dalam sistem pembelajaran. Tidak hanya memperkuat identitas peserta didik, tetapi juga meningkatkan relevansi pendidikan terhadap kehidupan sosial dan budaya mereka. Mengabaikan kebudayaan lokal berarti menegasikan bagian penting dari proses pembentukan manusia yang utuh. (Koentjaraningrat, 2019)

Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, dialog antarbudaya menjadi aspek penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan kebijakan pendidikan. Filsafat kebudayaan mendorong terciptanya ruang dialog dan interaksi yang sehat antarbudaya agar terjadi pemahaman dan penghargaan yang mendalam terhadap keragaman (Rahmawati, 2023). Ini merupakan fondasi dari pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Penerapan nilai-nilai budaya dalam kebijakan pendidikan juga berimplikasi pada peningkatan peran guru sebagai fasilitator nilai-nilai kemanusiaan di sekolah. Guru tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan, tetapi juga agen perubahan yang mampu menanamkan nilai-nilai budaya kepada peserta didik (Rahmawati, 2023). Untuk itu, diperlukan kebijakan yang memberikan ruang bagi guru untuk berkreasi sesuai konteks budaya.

Ki Hajar Dewantara mengemukakan konsep pendidikan yang sangat humanis dan kontekstual dengan budaya Indonesia. Prinsip "Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani" menunjukkan bahwa pendidikan harus memanusiakan manusia, menghargai kodrat alam dan kodrat zaman, serta memperlakukan peserta didik sebagai subjek yang aktif. Pandangan ini relevan dalam perumusan kebijakan manajemen pendidikan masa kini, yang menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dan dialogis. Guru bukan sekadar penyampai informasi, melainkan pendamping yang membimbing peserta didik sesuai potensi dan karakter unik masing-masing. Gagasan ini memperkuat pentingnya landasan budaya dan nilai-nilai kemanusiaan dalam pendidikan. Kebijakan pendidikan yang humanis dan berbasis budaya akan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan memberdayakan semua pihak. Hal ini akan berdampak positif terhadap hasil belajar serta pembentukan karakter peserta didik (Arifin, 2022). Maka, filsafat kebudayaan dapat menjadi jembatan antara nilai-nilai lokal dengan pengembangan kebijakan pendidikan nasional.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa studi mengenai Relevansi Filsafat Kebudayaan dalam Menyusun Kebijakan Manajemen Pendidikan yang Humanis penting dilakukan untuk memperkuat orientasi kebijakan pendidikan pada nilai-nilai kemanusiaan dan kebudayaan. Dengan pendekatan ini, pendidikan diharapkan mampu menciptakan manusia yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga matang secara sosial dan budaya (Fadillah & Rohman, 2021).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*), yaitu pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan untuk memperoleh pemahaman konseptual dan teoretis terhadap topik “Relevansi Filsafat Kebudayaan dalam Menyusun Kebijakan Manajemen Pendidikan yang Humanis.” Studi pustaka ini memanfaatkan berbagai jenis sumber sekunder seperti jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku referensi akademik, prosiding seminar, dan artikel ilmiah daring yang dipublikasikan dalam rentang tahun 2018–2025. Pemilihan sumber dilakukan secara purposif, dengan memperhatikan kredibilitas penerbit, relevansi isi dengan fokus penelitian, serta aktualitas informasi yang disajikan. Langkah-langkah utama dalam studi pustaka ini meliputi identifikasi kata kunci, seleksi literatur, ekstraksi data, dan analisis tematik terhadap ide-ide kunci yang berkaitan dengan filsafat kebudayaan, manajemen pendidikan, serta nilai-nilai humanisme.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan deskriptif-kualitatif, dengan tujuan mengungkap keterkaitan konseptual antara filsafat kebudayaan dan kebijakan pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Peneliti melakukan proses sintesis literatur, yaitu menggabungkan dan membandingkan berbagai sudut pandang para ahli untuk merumuskan interpretasi baru terhadap bagaimana filsafat kebudayaan dapat menjadi landasan normatif dalam merancang kebijakan pendidikan yang humanis dan kontekstual. Validitas informasi diperkuat dengan membandingkan berbagai sumber secara triangulatif dan memastikan bahwa argumen yang dibangun memiliki pijakan teoretis yang kuat dan relevan. Dengan demikian, studi ini tidak hanya menghasilkan pemahaman mendalam mengenai isu yang diteliti, tetapi juga memberi kontribusi konseptual terhadap praktik kebijakan pendidikan di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Filsafat kebudayaan mengkaji nilai, norma, simbol, dan praktik dalam masyarakat yang membentuk pola pikir kolektif. Dengan kerangka ini, pembuat kebijakan pendidikan dapat menyusun regulasi yang sensitif terhadap identitas budaya lokal. Sebagai contoh, konsep "budaya merdeka belajar" mendorong integrasi nilai kebudayaan lokal ke dalam kurikulum sesuai karakteristik daerahnya. Dalam konteks Indonesia yang multikultural, pindah dari kurikulum seragam ke kurikulum yang kontekstual akan meningkatkan relevansi pembelajaran serta memperkuat rasa kepemilikan budaya di kalangan siswa. Penggunaan filsafat kebudayaan membantu mencegah pendidikan menjadi mekanistik dan alienatif.

Kebijakan Merdeka Belajar digagas untuk memberikan kebebasan dan tanggung jawab kepada peserta didik, guru, dan sekolah, sehingga berkembang suasana belajar yang humanis dan partisipatif. Paradigma ini menempatkan murid sebagai agen aktif, bukan objek transfer pengetahuan, sesuai teori humanisme Paulo Freire yang mendorong dialog dan kesadaran kritis. Evaluasi terhadap Merdeka Belajar menegaskan adanya peningkatan motivasi belajar pada siswa, meskipun implementasi di lapangan membutuhkan dukungan guru dan infrastruktur yang memadai.

Dalam kerangka Merdeka Belajar, guru tidak sekadar mengajar, melainkan bertindak sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing. Mereka diharapkan mampu memicu rasa ingin tahu dan kreativitas siswa, mengawasi proses pembelajaran, dan memastikan kesejahteraan emosional peserta didik. Studi menunjukkan guru perlu pembekalan yang cukup agar dapat menjalankan peran ini ketiadaan pelatihan dan kesiapan mendasar menjadi hambatan serius di banyak wilayah. Kebijakan manajemen pendidikan harus memasukkan program peningkatan kompetensi guru agar sesuai dengan tuntutan humanis.

Berdasarkan hasil telaah pustaka, pendidikan modern saat ini menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan esensi kemanusiaan peserta didik di tengah perkembangan teknologi dan tekanan sistemik dalam dunia pendidikan. Humanisasi dalam pendidikan menjadi semakin penting mengingat adanya kecenderungan depersonalisasi siswa akibat kebijakan pendidikan yang terlalu menekankan pada capaian kognitif. Isnaini (2023) menjelaskan bahwa pendidikan yang tidak mengakomodasi dimensi afektif dan nilai-nilai kemanusiaan berpotensi menghasilkan generasi yang kering secara emosional dan sosial. Oleh

karena itu, kajian ini menegaskan bahwa pendekatan humanistik dalam kebijakan manajemen pendidikan merupakan kebutuhan mendesak, bukan sekadar wacana.

Melalui pendekatan studi pustaka, filsafat kebudayaan diidentifikasi sebagai sumber konseptual penting dalam membangun landasan berpikir yang dalam dan komprehensif bagi kebijakan pendidikan. Filsafat kebudayaan tidak hanya membahas relasi manusia dengan nilai-nilai simbolik budayanya, namun juga menyentuh persoalan eksistensial tentang makna pendidikan dalam kehidupan. Menurut Koeswanti (2022), pendidikan harus mencerminkan kebutuhan budaya lokal dan nilai-nilai universal agar mampu membentuk kepribadian yang utuh. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan yang humanis perlu merujuk pada filsafat kebudayaan agar tidak kehilangan akar identitas lokal maupun arah moralitas global.

Salah satu temuan penting dalam kajian pustaka adalah bahwa kebijakan pendidikan yang berorientasi humanis harus memberi tempat bagi nilai budaya lokal. Berdasarkan penelitian Hasinuddin (2024), nilai-nilai seperti gotong royong, saling menghargai, dan kesederhanaan yang tumbuh dalam budaya masyarakat Indonesia dapat dijadikan basis dalam membentuk kebijakan pendidikan yang membumi dan kontekstual. Dalam praktik manajemen pendidikan, ini dapat diterapkan melalui penyusunan kurikulum, sistem evaluasi, dan tata kelola sekolah yang mencerminkan budaya lokal sebagai sumber pembentukan karakter. Pendekatan ini tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga memperkuat identitas nasional dan moral peserta didik.

Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan holistik sangat relevan dalam konteks pembangunan manusia seutuhnya. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mencerdaskan intelektual semata, tetapi juga harus mengembangkan potensi emosional, spiritual, dan sosial peserta didik. Dalam hal ini, pemikiran Paulo Freire tentang pendidikan pembebasan dan pemikiran Ibnu Tufail mengenai pendidikan melalui pengalaman langsung menjadi acuan penting (Farah et al., 2023). Studi pustaka ini memperlihatkan bahwa pendekatan filosofis ini dapat dijadikan dasar kebijakan manajemen pendidikan yang tidak hanya menargetkan output akademik, tetapi juga proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sebagai subjek aktif.

Studi pustaka juga menyoroti pentingnya manajemen pendidikan yang mengakomodasi realitas sosial masyarakat Indonesia yang multikultural. Pendidikan multikultural bukan sekadar memperkenalkan kebudayaan lain, tetapi juga menciptakan ruang dialog dan

penghargaan atas perbedaan. Mustaqim (2023) menekankan bahwa pendekatan ini mampu menumbuhkan toleransi dan mengurangi diskriminasi di lingkungan sekolah. Dalam konteks manajemen pendidikan, kebijakan yang humanis perlu memasukkan nilai-nilai multikulturalisme secara sistemik, baik dalam pengembangan kurikulum, pelatihan guru, maupun manajemen interaksi antarwarga sekolah. Hal ini akan memperkuat kohesi sosial dan membentuk generasi yang inklusif.

Kajian terhadap kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) mengungkapkan bahwa kebijakan ini memiliki kedekatan nilai dengan prinsip pendidikan humanis. MBKM memberikan ruang bagi peserta didik untuk memilih jalur belajarnya, mengembangkan minat, dan belajar dari lingkungan luar kampus (Satria & Kurniawan, 2022). Studi pustaka ini menegaskan bahwa implementasi kebijakan ini harus dipayungi dengan manajemen pendidikan yang humanis agar tidak hanya menjadi kebijakan administratif, tetapi benar-benar memfasilitasi proses pemanusiaan peserta didik. Artinya, keberhasilan MBKM sangat bergantung pada pemahaman dan komitmen aktor pendidikan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi dasarnya.

Mengacu filsafat kebudayaan, kurikulum harus menyerap nilai-nilai lokal seperti adat, bahasa, dan praktik masyarakat setempat. Studi 2023 menyoroiti bahwa integrasi nilai lokal dalam desain evaluasi pendidikan agama dan karakter mampu meningkatkan relevansi pembelajaran dan membentuk individu yang menghormati keberagaman. Kebijakan selanjutnya harus menyediakan ruang dalam RPP dan kurikulum agar budaya lokal tidak sekadar simbolis, tetapi menjadi landasan pembelajaran. Freire menekankan bahwa proses pendidikan harus bersifat dialogis, saling membangun kesadaran kritis. Filosofi ini mendasari kebijakan Merdeka Belajar yang mendorong partisipasi siswa aktif dalam pengambilan keputusan pembelajaran. Pendidik tidak lagi tampil sebagai otoritas tunggal, tetapi sebagai fasilitator yang memfasilitasi pencarian makna dan analisis. Dalam praktiknya, manajemen pendidikan perlu mensosialisasikan metode pembelajaran aktif agar tidak berujung hanya pada retorika.

Manajemen pendidikan humanis menuntut kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Proyek pembelajaran berbasis budaya lokal misalnya, akan optimal ketika melibatkan orang tua dan komunitas dalam pelaksanaan dan evaluasi. Pengalaman Merdeka Berbudaya di PAUD menunjukkan sinergi antar pemangku kepentingan dapat memperkuat

nilai-nilai budaya dan sosial. Kebijakan harus bersifat desentralistik serta mendukung inisiatif lokal.

Di era globalisasi dan digital, budaya tradisional terancam. Filsafat kebudayaan menjadi pengingat bahwa pendidikan harus menjembatani teknologi dan identitas budaya. Kebijakan manajemen pendidikan perlu memasukkan modul literasi budaya dan digital secara seimbang, agar peserta didik tidak hanya melek teknologi, tetapi juga peka terhadap warisan budaya. Ini akan menumbuhkan generasi yang kritis, kreatif, dan berbudaya ciri esensial pendidikan yang humanis dan kontekstual.

Penelitian literatur mendalam menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan yang dirancang secara filosofis harus mempertimbangkan tiga dimensi penting: ontologi (hakikat peserta didik), epistemologi (cara memperoleh pengetahuan), dan aksiologi (nilai-nilai yang dikembangkan). Abu Bakar (2024) menyatakan bahwa pendidikan yang tidak memiliki kerangka filosofis yang jelas akan cenderung pragmatis dan tidak konsisten. Oleh karena itu, manajemen pendidikan yang berbasis pada filsafat kebudayaan dan humanisme harus terlebih dahulu menyusun kerangka kerja yang berpijak pada tiga dimensi tersebut agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menyentuh akar persoalan pendidikan.

D. KESIMPULAN

Pendekatan humanis dalam kebijakan manajemen pendidikan merupakan kebutuhan mendasar dalam merespons kompleksitas zaman, terutama dalam konteks masyarakat multikultural seperti Indonesia. Filsafat kebudayaan memberikan landasan filosofis yang kuat untuk menyusun sistem pendidikan yang tidak sekadar menekankan aspek kognitif, tetapi juga menghargai dimensi afektif dan sosial peserta didik. Dengan menempatkan peserta didik sebagai subjek yang utuh dan bermartabat, pendekatan ini menegaskan pentingnya pendidikan yang berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan, budaya lokal, serta realitas sosial yang dihadapi siswa sehari-hari. Artinya, kebijakan pendidikan yang humanis bukan hanya ideal secara normatif, melainkan juga sangat relevan secara operasional dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh.

Meski demikian, penerapan kebijakan yang berlandaskan filsafat kebudayaan dan humanisme masih menemui berbagai kendala. Salah satu tantangan utama adalah belum meratanya pemahaman dan kapasitas para pendidik dan pengelola pendidikan dalam menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam praktik pembelajaran dan manajemen sekolah.

Selain itu, orientasi pendidikan yang masih dominan pada capaian teknis seperti nilai ujian atau akreditasi sering kali menghambat proses pembelajaran yang bersifat reflektif, kontekstual, dan partisipatif. Hal ini menunjukkan bahwa masih terjadi kesenjangan antara idealisme filsafat pendidikan dengan implementasi nyata di lapangan, yang berpotensi mengurangi efektivitas kebijakan pendidikan yang dirancang.

Diperlukan serangkaian langkah strategis agar kebijakan pendidikan yang humanis dapat benar-benar terwujud secara berkelanjutan. Rekomendasi utama dari kajian ini adalah perlunya pelatihan intensif bagi para pemangku kepentingan pendidikan—terutama guru, kepala sekolah, dan pengambil kebijakan—tentang konsep dan aplikasi filsafat kebudayaan serta pendidikan humanis. Selain itu, perlu dilakukan reformulasi terhadap sistem evaluasi pendidikan yang tidak hanya fokus pada hasil akademik, tetapi juga mencakup indikator pembangunan karakter, empati sosial, dan penghormatan terhadap keberagaman budaya. Dengan demikian, pendidikan Indonesia dapat menjadi wahana pembentukan manusia yang berpengetahuan, berkarakter, dan memiliki kesadaran budaya serta tanggung jawab sosial yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, M. (2024). *Filsafat Pendidikan dan Humanisme dalam Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amka, A. (2020). *Kebijakan Pendidikan Berbasis Multikulturalisme: Studi Kasus Implementasi Kurikulum di Sekolah Pinggiran*. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 25(3), 412–421.
- Arifin, Z. (2022). *Filsafat Pendidikan dan Kemanusiaan dalam Perspektif Budaya Nusantara*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Fadillah, N., & Rohman, F. (2021). *Pendidikan Humanistik di Era Digital: Tinjauan Kritis atas Perkembangan Kurikulum*. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 8(1), 55–68.
- Fajar, T., & Nuraini, S. (2023). Evaluasi Indikator Kinerja Pendidikan Humanistik di Sekolah Menengah. *Jurnal Manajemen Pendidikan Indonesia*, 11(3), 230–245. <https://doi.org/10.15294/jmpi.v11i3.2983>
- Farah, N., Kusuma, Y., & Lestari, M. (2023). Pendidikan Holistik dalam Perspektif Filsafat Humanisme: Telaah Pemikiran Paulo Freire dan Ibnu Tufail. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 8(1), 45–59. <https://doi.org/10.21009/jpk.v8i1.2034>

- Hasinuddin, R. (2024). Kearifan Lokal sebagai Basis Manajemen Pendidikan Humanis di Indonesia. *Jurnal Kebudayaan dan Pendidikan*, 12(1), 12–27.
<https://doi.org/10.31289/jkp.v12i1.4521>
- Isnaini, R. (2023). Krisis Humanisme dalam Sistem Pendidikan Modern: Sebuah Analisis Kritis. *Jurnal Filsafat dan Pendidikan*, 10(2), 101–115.
<https://doi.org/10.21009/jfp.v10i2.2210>
- Kattouf, J. (2019). *Philosophy of Culture: Understanding Humanity Through Cultural Praxis*. *Journal of Cultural Studies*, 14(2), 134–148.
- Koeswanti, A. (2022). Pendidikan Berbasis Budaya: Alternatif Humanisasi dalam Dunia Pendidikan. *Jurnal Filsafat dan Humaniora*, 9(1), 1–16.
<https://doi.org/10.25077/jfh.v9i1.3187>
- Kurniawan, H. (2021). *Pendidikan Multikultural dan Dialog Antarbudaya dalam Pembelajaran*. Bandung: Alfabeta.
- Mustaqim, F. (2023). Pendidikan Multikultural dalam Manajemen Sekolah: Upaya Menumbuhkan Toleransi sejak Dini. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 13(2), 77–91.
<https://doi.org/10.21831/jpk.v13i2.3990>
- Rahmawati, Y. (2023). *Guru sebagai Agen Perubahan Budaya Sekolah: Tantangan dan Strategi dalam Pendidikan Humanistik*. *Jurnal Kependidikan*, 9(1), 23–35.
- Satria, M., & Kurniawan, D. (2022). Kebijakan Merdeka Belajar dalam Perspektif Pendidikan Humanistik. *Jurnal Manajemen Pendidikan Nasional*, 6(4), 310–325.
<https://doi.org/10.31002/jmpn.v6i4.3824>
- Sutarto, M. (2019). *Ki Hadjar Dewantara dan Pendidikan yang Memerdekakan: Relevansi dalam Konteks Kekinian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widiatmoko, A. (2020). *Manajemen Pendidikan Humanistik dalam Kebijakan Pemerintah: Kritik atas Pendekatan Teknosentris*. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 7(2), 145–160.